

ABSTRAK

PERUMUSAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DAN UPAYA SEKURITISASI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER PADA MASA MENTERI-KP SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)

Oleh

MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA

Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster memicu ancaman penyelundupan benih lobster yang ditandai dengan kehadiran kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI. KKP selaku representasi pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat seperangkat kebijakan untuk menangani permasalahan ancaman tersebut. Dalam periode berlakunya peraturan larangan ekspor benih lobster, sorotan utama yang berkenaan dengan ancaman ini ialah upaya pemberantasan pemerintah Indonesia terhadap keberadaan kelompok kejahatan perikanan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan NKRI.

Adapun tujuan penelitian ini ialah, menganalisis perumusan kebijakan larangan ekspor benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Selanjutnya, menganalisis upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster pada masa Menteri-KP Susi Pudjiastuti (2015-2019). Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi serta penggunaan konsep kebijakan luar negeri dan *transnational organized fisheries crime*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dihimpun melalui studi pustaka dan dokumentasi seperti dokumen, buku, artikel dan publikasi situs laman resmi KKP.

Kebijakan larangan ekspor benih lobster merupakan *output* dari kepentingan maritim Indonesia yang berlandaskan hukum rezim RPOA-IUU. Dalam upaya sekuritisasi penyelundupan benih lobster, Menteri Susi (*securitizing actor*) memberikan bantuan program alih profesi bagi para nelayan yang terdampak (*audience*) serta memberikan instruksi khusus ke Satgas 115 (*facilitating conditions*) guna dapat mengamankan rute jalur penyelundupan benih lobster di wilayah perbatasan NKRI yang minim pengawasan.

Kata Kunci: Benih Lobster, Kebijakan Luar Negeri, Menteri-KP Susi Pudjiastuti, TOFC, Sekuritisasi

ABSTRACT

POLICY FORMULATION OF EXPORT BAN AND SECURITIZATION EFFORTS OF LOBSTER SEED SMUGGLING DURING MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SUSI PUDJIASTUTI (2015-2019)

BY

MUHAMMAD AKBAR KODAPIT SAPTA

Permen-KP 1 of 2015 jo 56 of 2016 concerning prohibition on export of lobster seeds has triggered the threat of smuggling lobster seeds which is marked by the presence of transnational organized fisheries crime (TOFC) in Indonesian border area. KKP is given authority to make policy to deal with this threat. During the regulation was in force, the main focus regarding this threat was the Indonesian government's efforts to eradicate TOFC in Indonesian border area. The research purposes are to analyze policy formulation to prohibit the export of lobster seeds during Minister Susi Pudjiastuti (2015-2019). Furthermore, analyzing efforts to securitize lobster seed smuggling during Minister Susi Pudjiastuti (2015-2019) with a qualitative descriptive approach. This research uses securitization theory and concept of foreign policy and TOFC. Data collection was collected through literature studies and documentations such as books, journals, articles and document publications on KKP website. The policy is output of Indonesia's maritime interests which are based on the law of the RPOA-IUU regime. In an effort to securitize lobster seed smuggling, Minister Susi (securitizing actor) provided professional transfer program assistance for affected fishermen (audience) and gave special instructions to Task Force 115 (facilitating conditions) in order to be able to secure the lobster seed smuggling routes in the NKRI border areas where there is minimal surveillance.

Keywords: Foreign Policy, Lobster Seeds, Minister Susi Pudjiastuti, TOFC, Securitization